

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan perbankan di Indonesia melakukan pelaporan sosial pada dasarnya disebabkan oleh perubahan paradigma pertanggungjawaban dari manajemen ke *shareholder* menjadi manajemen ke *stakeholder* serta untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat. Perbankan syariah menjadi perhatian khusus pada hal pelaporan tanggung jawab sosial disebabkan oleh prinsip dasar operasional bank syariah yang menyebutkan bahwa tidak hanya *profit oriented* tetapi juga berorientasi pada *falah*. Menurut Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 pasal 4 yang mengungkapkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial pada bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Sehingga aspek sosial tersebut tidak hanya sebagai kepedulian perusahaan melainkan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bentuk keterlibatan lingkungan perusahaan dan masyarakat dalam mencapai tujuan bisnisnya. Munculnya peraturan pengelolaan lingkungan hidup memberikan bukti adanya tekanan pemerintah untuk mendorong perusahaan memperhatikan lingkungan sosialnya. Organisasi perusahaan dituntut untuk ikut berkontribusi dalam perubahan lingkungan serta berkontribusi langsung terhadap kelangsungan hidup

masyarakat. Dimana hal ini diharapkan dapat menggambarkan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) Bank Umum Syariah. Pelaporan pertanggungjawaban sosial (*Islamic Social Reporting*) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab perusahaan selain kewajiban untuk menyediakan laporan keuangan kepada shareholder khususnya pemegang saham, perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham.

Bank dunia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis dalam kontribusi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan untuk kelangsungan hidup karyawan, keluarga, masyarakat lokal sekitar perusahaan didirikan dan masyarakat keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan (Fitria dan Hartanti, 2010). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah dan diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara islami. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif islam, yaitu

pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*).

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan CSR dalam konteks islam, semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah terutama pengungkapan sosial pada perusahaan atau lembaga berbasis syariah. Dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan atau lembaga syariah, banyak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR). Pengungkapan tanggung jawab sosial bersifat syariah dikembangkan dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index*. Pengungkapan dana sosial pada Bank Umum Syariah sebatas disajikan pada laporan dana qardul hasan atau dana kebajikan, sedangkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Pada perspektif islam, transparansi merupakan salah satu amanah yang menuntut organisasi untuk melakukan pengungkapan, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Sehingga berdampak pada pengungkapan tanggung jawab setiap perbankan syariah menjadi berbeda. Perbedaan pengungkapan tersebut disebabkan tidak adanya standar syariah yang baku tentang pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial (Asrori 2015). Tidak adanya standar yang baku tersebut, menjadikan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menetapkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang menjadi tolok ukur pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti.

Penyaluran dana dari seluruh program CSR yang diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah tahun 2015 sebesar Rp 69.103.782.784,00. Berikut daftar dana CSR dari masing-masing Bank Umum Syariah yang telah disalurkan pada tahun 2015.

Tabel 1.1
PENYALURAN DANA CSR BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015

No	Nama Bank Umum Syariah	Dana CSR yang telah disalurkan
1	PT Bank Muamalat Indonesia	Rp 17.289.549.884
2	PT Bank Syariah Mandiri	Rp 31.280.000.000
3	PT Bank Mega Syariah	Rp 740.100.000
4	PT Bank BRI Syariah	Rp 1.374.468.181
5	PT Bank Syariah Bukopin	Rp 642.011.850
6	PT Bank BNI Syariah	Rp 12.781.418.178
7	PT Bank Jabar Banten Syariah	Rp 181.000.000
8	PT BCA Syariah	Rp 380.099.691
9	PT Bank Victoria Syariah	Rp 130.135.000
10	PT Maybank Syariah Indonesia	Rp 60.000.000
11	PT Bank Panin Syariah	Rp 4.078.000.000
12	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Rp 167.000.000
	Total	Rp 69.103.782.784

Sumber : Laporan Tahunan Bank Umum Syariah tahun 2015

Penelitian mengenai laporan tanggung jawab Bank Umum Syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan laporan bank konvensional. Secara umum tingkat pengungkapan ISR Bank Umum Syariah hanya menunjukkan 61,73% dari keseluruhan sampel bank syariah, dalam penelitian Saridona (2015) mengenai pelaporan tanggung jawab bank syariah berbasis *Sharia Enterprise Theory* mengungkapkan bahwa tindakan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah masih dipengaruhi kepentingan-kepentingan perusahaan dalam hal *money* dan *power* sedangkan prinsip syariah tidak terlalu berperan dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial Bank Umum Syariah.

Tingkat tanggung jawab sosial juga memiliki hubungan erat dengan *Corporate Governance*. Berdasarkan prinsip Syariah, *Corporate Governance* menjadi salah satu topik yang paling menjadi sorotan penelitian dalam lembaga keuangan islam beberapa tahun terakhir semenjak lembaga keuangan islam terutama Bank Umum Syariah menunjukkan peningkatan yang semakin membaik, mampu bersaing dan tetap bertahan diantara bank konvensional. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan menambah nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.

Menurut surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs tahun 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan tentang prinsip dasar pelaksanaan yang sejalan dengan paradigma islam yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) yang mendorong kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab sosial di antara semua pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Prinsip *Corporate Governance* mengharuskan setiap perusahaan dikelola secara baik dan bertanggungjawab dengan mengetahui hak dan kewajiban setiap unsur perusahaan.

Unsur *Corporate Governance* menurut surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs tahun 2010 meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-

Komite (Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko Serta Komite Remunerasi dan Nominasi), Dewan Pengawas Syariah serta penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal. Melakukan penerapan tanggung jawab sosial, berarti juga telah memenuhi prinsip *responsibilitas* pada *Corporate Governance*. *Corporate Governance* diharapkan dapat menjadi alat pemberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima keuntungan atas laba yang telah di investasikan pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengungkapan terhadap aspek-aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas terhadap investor dan *stakeholders*.

Salah satu unsur dari *Corporate Governance* pada penelitian ini yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan jumlah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016) serta Khoirudin (2013) menunjukkan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* karena dapat mendorong manajemen selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan pelaporan sosial perusahaan agar regulasi dari BI terpenuhi, serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Unsur *Corporate Governance* selanjutnya pada penelitian ini adalah Dewan Direksi dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Direksi menurut peraturan Bank Indonesia N0.11/33/PBI/2009 tanggal

07 Desember 2009 merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) menjelaskan bahwa dengan adanya jumlah Direksi yang optimal dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan indeks ISR juga akan meningkat.

Unsur lain dari *Corporate Governance* pada penelitian ini adalah Komite Audit dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Komite Audit merupakan komite yang bertugas untuk memberikan pendapat dan mengidentifikasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) menjelaskan bahwa dengan adanya Komite Audit yang dimiliki perusahaan dimana Komite Audit tersebut mampu bekerja secara efektif, sehingga dapat menekan manajemen untuk melaporkan ISR sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial bagi pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) menunjukkan Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Unsur *Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR selanjutnya adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) menyatakan bahwa Dewan

Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, kepatuhan dengan prinsip syariah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan, sehingga posisi Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi penentu pengungkapan tanggungjawab sosial perbankan syariah.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi menganggap perlu memberikan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan adanya pengungkapan sosial tersebut hubungan baik dan kepercayaan sosial dengan *debtholders* dapat terus dijaga.

Faktor selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas. Penelitian yang dilakukan Asyhari (2016) menyatakan bahwa perusahaan memiliki nilai likuiditas yang tinggi menunjukkan semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Tingginya kemampuan membayar tersebut mendorong perusahaan untuk melaporkan informasi perusahaan lebih luas lagi sebagai bentuk bukti kredibilitas dan pemenuhan amanah Bank Umum Syariah.

Terdapat *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Research gap* penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu Gap penelitian pertama dari hasil penelitian

mengenai Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Khoirudin (2013), Baidok dan Septiarini (2016) serta Charles (2012) menunjukkan Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arshad, *et al* (2014) dan Hidayati (2014) yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Gap penelitian kedua mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) menunjukkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berbanding terbalik dengan penelitian Charles (2012) yang menunjukkan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Gap penelitian ketiga mengenai hasil penelitian pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan oleh Asyhari (2016) dan Charles (2012) menunjukkan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) yang menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Gap penelitian keempat mengenai pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016), Arshad, *et al* (2014) dan Hidayati (2014) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016), Sunarto (2016), Rita,dkk (2015) dan Khoirudin (2013) menunjukkan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Selain unsur *Corporate Governance*, penelitian ini juga meneliti pengaruh *leverage* dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Research gap* selanjutnya dari penelitian terdahulu mengenai *leverage* dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu gap penelitian kelima mengenai hasil penelitian *leverage* yang dilakukan oleh Asyhari (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berbanding terbalik dengan penelitian Lestari (2016), Rita,dkk (2015), Rama (2014), Mifachul (2014) dan Putra, *et al* (2014) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Gap penelitian keenam mengenai hasil penelitian likuiditas yang dilakukan oleh Lestari (2016) dan Putra, *et al* (2014) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berbanding terbalik dengan penelitian menurut Asyhari (2016) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Pentingnya penelitian mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ini untuk diteliti karena adanya fenomena Bank Umum Syariah di Indonesia belum mengungkapkan secara penuh pengungkapan sosialnya sebagai bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan amanah yang diberikan oleh pihak *stakeholder* maupun *shareholder*. Pentingnya penelitian ini dilakukan jika dilihat dari latar belakang dan *research gap* yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa masih mengalami ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu. Oleh sebab itu penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*, unsur *Corporate*

Governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah serta variabel lain yaitu *leverage* dan likuiditas. Dengan demikian peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage* dan Likuiditas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian.

Maka terdapat manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai perkembangan pengungkapan ISR Bank Umum Syariah di Indonesia, menambah wawasan baru mengenai pengungkapan ISR serta

dapat menjadi referensi pengembangan penelitian yang akan datang mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2. Manfaat Praktis

Bagi Mudharib penelitian ini dapat dijadikan kontrol dan pengawasan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilkakukan oleh bank syariah. Dilaporkannya *Islamic Social Reporting*, dapat meningkatkan kepercayaan mudharib ketika memberikan dana kepada bank syariah. Bagi Bank Umum Syariah selaku sahibul maal, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi positif dan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan pada peningkatan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial kepada msasyarakat dan pemilik dana.

1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan sistematika, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh pihak yang menggunakannya. Sistematika tersebut terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang dijadikan objek penelitian, rumusan masalah dimana akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada objek penelitian tersebut, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan referensi, landasan teori mengenai teori-teori menurut para ahli yang akan digunakan pada penelitian, kerangka pemikiran dimana akan menggambarkan alur dari hubungan variabel yang akan diuji oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan prosedur rancangan penelitian, batasan-batasan penelitian, identifikasi variabel yang akan digunakan peneliti baik variabel terikat maupun variabel bebas, definisi operasional dan cara pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data dimana nanti akan menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai gambaran subyek yaitu populasi dari penelitian, tehnik analisis data yang digunakan, dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.